



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA DEPOK
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD IDRIS**
2. Jabatan : **WALIKOTA**
3. NHK : **152937**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.687.325.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1292 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 1.403.344.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1397 m²/400 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.677.481.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 321 m²/35 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 481.500.000
4. Tanah Seluas 75 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.223.000.000**

1. MOBIL, HONDA CIVIC F02 2.0 AT / SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA / MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX WW150EXH IN AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 23.500.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 235.500.000
5. MOBIL, HONDA CR-V CVT TURBO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 519.000.000
6. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.550.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	837.756.335
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.749.631.335
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.749.631.335

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.